

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan kebijakan imunitas negara asing Tiongkok dari absolute foreign state immunity model menjadi *restrictive foreign state immunity* model pada periode 2020-2024 terjadi karena doktrin imunitas absolut tidak lagi mampu mengakomodasi kepentingan Tiongkok sebagai negara yang semakin terintegrasi dalam perdagangan, investasi, dan aktivitas hukum internasional. Dalam perspektif Eidenfalk (2009), perubahan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan faktor internasional yang berfungsi sebagai *sources of change*. Dari sisi domestik, birokrasi berperan melalui proses legislasi yang dipimpin Kementerian Luar Negeri dan NPCSC, sementara kelompok kepentingan seperti BUMN, lembaga keuangan, perusahaan swasta, serta komunitas akademisi hukum mendorong kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi kepentingan Tiongkok di luar negeri. Media, opini publik, dan partai politik turut memperkuat legitimasi perubahan kebijakan, meskipun pengaruhnya bekerja dalam karakteristik sistem politik Tiongkok yang berada di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

Dari sisi internasional, perubahan kebijakan dipengaruhi oleh perkembangan norma hukum internasional yang semakin mengarah pada penerapan doktrin *restrictive immunity*, integrasi ekonomi di kawasan regional, meningkatnya persaingan hukum dan politik antara Tiongkok dan Amerika Serikat, perluasan aktivitas ekonomi Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), serta meningkatnya keterlibatan Tiongkok dalam arbitrase dan sengketa investasi

internasional. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa posisi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global memerlukan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan timbal balik terhadap kepentingan negara, perusahaan, dan aset-aset Tiongkok di luar negeri. Dalam konteks ini, mempertahankan doktrin imunitas absolut dipandang semakin tidak sesuai dengan kebutuhan strategis Tiongkok dalam lingkungan internasional yang semakin kompleks dan saling bergantung.

Namun, faktor-faktor domestik dan internasional tersebut tidak secara otomatis menghasilkan perubahan kebijakan. Sesuai dengan model Eidenfalk, perubahan baru terjadi ketika para pengambil keputusan mempersepsikan adanya *window of opportunity* untuk melakukan reformasi kebijakan. Tekanan litigasi internasional, meningkatnya eksposur kepentingan ekonomi Tiongkok di luar negeri, serta kebutuhan untuk menerapkan prinsip resiprositas dipandang sebagai momentum yang tepat untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, pengesahan FSIL pada tahun 2023 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 merupakan hasil dari persepsi para pengambil keputusan bahwa transisi menuju *restrictive foreign state immunity model* merupakan pilihan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Tiongkok sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan politik internasional.

4.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi *Foreign State Immunity Law* (FSIL) setelah diberlakukan, khususnya bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik peradilan Tiongkok dan pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa yang melibatkan negara asing. Selain itu, penelitian

ini menghadapi keterbatasan dalam pengumpulan data karena sebagian besar proses perumusan kebijakan di Tiongkok berlangsung secara tertutup dan tidak seluruh dokumen maupun diskusi internal pemerintah dapat diakses secara publik. Oleh karena itu, penelitian mendatang dapat memanfaatkan data yang lebih beragam, termasuk putusan pengadilan, dokumen resmi yang lebih mutakhir, maupun wawancara dengan pakar hukum internasional untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kebijakan imunitas negara asing Tiongkok.